

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024



**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Profil Organisasi	2
1.3.1 Budaya Kerja	2
1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3.3 Sumber Daya Manusia	5
1.3.4 Sumber Daya Anggaran	5
1.4 Aspek dan Isu Strategis Perangkat Daerah	5
1.4.1 Aspek Strategis	5
1.4.2 Isu Strategis Perangkat Daerah	5
1.5 Sistematika Penulisan LkjIP	5
BAB II	9
PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja PD	9
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan 2024	9
2.3 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	10
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	15
2.5 Hasil Tindak Lanjut Tahun 2023	16
2.6 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	16
BAB III	17
AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1 Analisis dan Capaian Kinerja Tahun 2024	17
3.2 Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	58
3.3 Inovasi	65
3.4 Penghargaan	67
BAB IV	69
PENUTUP	69
4.1 Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja	69
4.2 Rencana Tindak Lanjut	69
LAMPIRAN	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tenaga Kesehatan Tahun 2024	5
Tabel 1.2 Asisten Tenaga Kesehatan Tahun 2024	6
Tabel 1.3 Tenaga Penunjang Tahun 2024	6
Tabel 1.4 Sarana dan prasarana kesehatan tahun 2024	6
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024	9
Tabel 2.2 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kesgiatan Tahun 2024	10
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Daerah Tahun 2025	15
Tabel 3.1 Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo Tahun 2023	17
Tabel 3.2. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis	19
Tabel 3.3. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis	28
Tabel 3.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan	58
Tabel 3.5 Anggaran dan Realisasi Belanja	58
Tabel 3.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Per Sub Kegiatan	59

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN

1. Daftar referensi
2. SK Tim Penyusun LKjIP 2024
3. SK Penetapan LKjIP
4. PK PD Murni dan Perubahan
5. Laporan realisasi anggaran per program, Kegiatan, Sub Kegiatan PD
 - FMIS
 - Manual Excel
6. SK IKU PD
7. Hasil SKM Tahun 2024
8. Hasil realisasi fisik dan keuangan program, kegiatan, subkegiatan
9. Penghargaan dan dokumentasi penghargaan yang diterima PD

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Dinas Kesehatan Daerah dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Dinas Kesehatan Daerah ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*, serta sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi.

Besar harapan kami bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Dinas Kesehatan Daerah ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai informasi maupun evaluasi kinerja bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Purworejo, Januari 2025

Pt. Dinas Kesehatan Daerah
Kabupaten Purworejo



dr. Sudarmi, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690220 200212 2 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis selama Tahun Anggaran 2024. Sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menunjukkan arah yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo dalam periode 2021-2026. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2024 ditetapkan dengan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024 . Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 (satu) sasaran, 13 (tiga belas) indikator kinerja diperoleh hasil bahwa semua indikator (100 %) sesuai target.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing Indikator Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

NO	SASARAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	INTER PRETASI
I	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	100%	100%	100%	(O)
		1.Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	100%	100%	(O)
		2.Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	100%	100%	(O)
		3.Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	100%	100%	(O)
		4.Pelayanan Kesehatan Balita	100%	100%	100%	(O)
		5.Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100%	100%	100%	(O)
		6.Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100%	100%	100%	(O)
		7.Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100%	100%	100%	(O)
		8.Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	100%	100%	(O)
		9.Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%	100%	100%	(O)
		10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100%	100%	100%	(O)
		11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100%	100%	100%	(O)

NO	SASARAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	INTER PRETASI
		12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100%	100%	100%	(O)
II	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	83	91,06	109 %	(O)

Capaian kinerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perbaikan *governance* dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance* dan *Clean Government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Oleh karena itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo tahun 2024 merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintahan atas penggunaan anggaran. Hal yang paling penting dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisa terhadap pengukuran kinerja. Laporan kinerja disusun untuk memberikan informasi kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada public atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo adalah untuk menilai serta mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo. Rekomendasi yang diharapkan dari hasil LKjIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menerapkan kebijakan dan strategi yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.

1.3. Profil Organisasi

1.3.1. Budaya kerja

Budaya Kerja adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari.

Budaya kerja dimaksudkan sebagai salah satu instrument reformasi birokrasi yang dilakukan secara sistematis melalui penggalian, perumusan, dan penerapan Nilai Budaya Kerja ke dalam pola pikir, pola perilaku dan pola Tindakan secara konsisten, konsekuen, dan kontinyu dalam rangka kelancaran, daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Ruang lingkup Budaya Kerja mencakup penerapan Nilai Budaya Kerja di seluruh SKPD dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah dan mencakup seluruh aparatur Pemerintah Daerah yang terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Purworejo.

Nilai Budaya Kerja di Ingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo yaitu bersih, ikhlas, melayani, akuntabel dan professional yang disebut "BERIMAN-PROFESIONAL" sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 36 Tahun 2014.

1.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam penerapan nilai dan perilaku Budaya Kerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo berdasarkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja mengacu pada Peraturan bupati Purworejo Nomor 120 Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

- a. Dinkes dipimpin oleh Kepala Dinkes berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
- b. Dinkes bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan sesuai dengan kewenangan daerah
- c. Dinkes dalam melaksanakan tugas, meyelenggarakan fungsi:
 - 1) Perumusan kebijakan bidang sarana dan prasarana, manajemen informasi dan perizinan fasilitas Kesehatan, pelayanan Kesehatan dan Kesehatan masyarakat, serta sumber daya manusia Kesehatan, farmasi, makanan dan minuman dan pemberdayaan masyarakat;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan bidang sarana dan prasarana, manajemen informasi dan perizinan fasilitas Kesehatan, pelayanan Kesehatan dan Kesehatan masyarakat, serta sumber daya manusia Kesehatan, farmasi, makanan dan minuman dan pemberdayaan masyarakat;
 - 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sarana dan prasarana, manajemen informasi dan perizinan fasilitas Kesehatan, pelayanan Kesehatan dan Kesehatan masyarakat, serta sumber daya manusia Kesehatan, farmasi, makanan dan minuman dan pemberdayaan masyarakat;
 - 4) Pelaksanaan kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinkes; dan

- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati berkaitan dengan tugas dan fungsi.

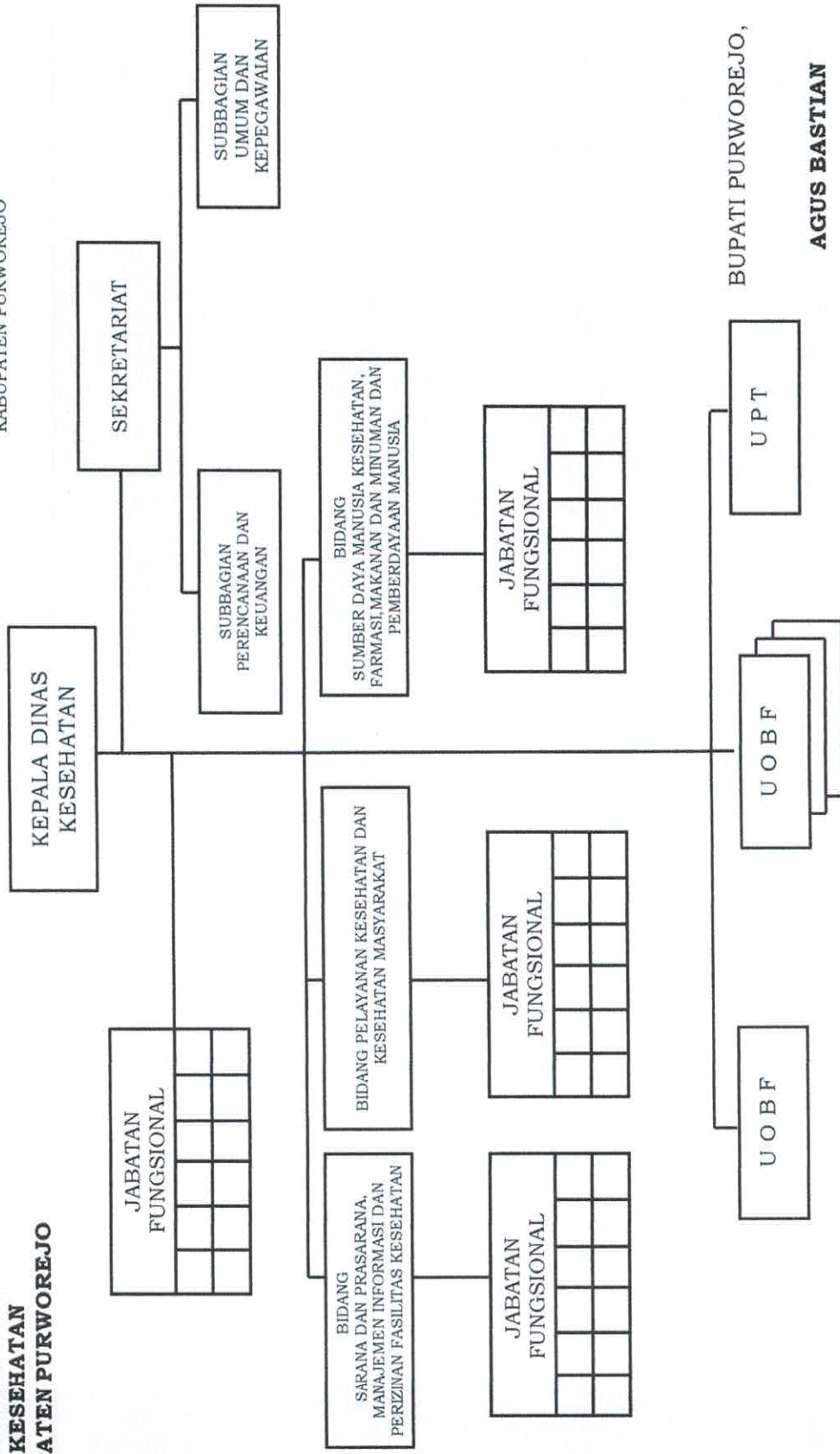
2. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinkes, terdiri dari:

- a. Kepala Dinkes;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Sarana Prasarana, Manajemen Informasi dan Perizinan Fasilitas Kesehatan;
- d. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kesehatan Masyarakat;
- e. Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan, Farmasi, Makanan dan Minuman dan Pemberdayaan Masyarakat;
- f. UOBK;
- g. UOBF;
- h. UPT; dan
- i. Jabatan Fungsional.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 84 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURWOREJO

**BAGAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURWOREJO**



BUPATI PURWOREJO,

AGUS BASTIAN

1.3.3. Sumber Daya Manusia

Analisis lingkungan baik intern maupun ekstern sangat penting bagi kelangsungan organisasi. Dengan mengetahui kondisi di dalam maupun luar organisasi akan dapat diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

Melalui metode analisis SWOT yakni memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan/kendala (*threats*), Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo telah mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan (*key success factors*) yang merupakan faktor penting dalam perencanaan strategis antara lain:

1. Keadaan Pegawai

Ketersediaan Sumber daya manusia kesehatan yaitu tenaga kesehatan (termasuk tenaga kesehatan strategis) dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan, pada Fasilitas Kesehatan Kabupaten Purworejo sejumlah 4.499 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Tenaga Kesehatan Tahun 2024

NO	JENIS TENAGA KESEHATAN	PNS		NON PNS	
		L	P	L	P
1	Medis	39	84	100	95
2	Psikologi Klinis	0	2	0	0
3	Keperawatan	101	274	210	551
4	Kebidanan	0	354	0	336
5	Kefarmasian	9	67	31	94
6	Kesehatan Masyarakat	15	29	2	25
7	Kesehatan Lingkungan	15	22	1	17
8	Gizi	11	37	1	17
9	Keterapian Fisik	15	20	6	14
10	Keteknisian Medis	11	42	14	42
11	Teknik Biomedika	16	49	34	54
12	Kesehatan Tradisional	0	0	0	0
13	Nakes lainnya	1	2	11	6

Tabel 1.2 Asisten Tenaga Kesehatan Tahun 2024

NO	JENIS TENAGA	PNS		NON PNS	
		L	P	L	P
1	Keperawatan	1	1	5	19
2	Kebidanan	0	0	0	6
3	Kefarmasian	0	1	7	78
4	Teknik Biomedika	0	0	0	2
5	Kesehatan Lingkungan	0	0	1	1
6	Gizi	0	0	3	13
7	Keteknisian Medis	0	1	1	0

Tabel 1.3 Tenaga Penunjang Tahun 2024

NO	JENIS TENAGA	PNS		NON PNS	
		L	P	L	P
1	Struktural	14	14	4	7
2	Dukungan Manajemen	106	134	568	626
3	Pendidikan dan Pelatihan	0	0	5	5

2. Keadaan Sarana/Prasarana

Dalam melaksanakan program dan kegiatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Purworejo, Dinas Kesehatan memiliki sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 1.4 Sarana dan prasarana kesehatan tahun 2024

NO	JENIS TENAGA KESEHATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Rumah Sakit	12	
2	Puskesmas	27	
3	Puskesmas Pembantu	63	
4	PKD	244	
5	Posyandu	1649	
6	Posbindu	984	
7	Mobil Ambulance/Pusling	54	
8	Mobil Operasional Dinas Kesehatan	9	

1.3.4. Sumber Daya Anggaran

Dukungan Dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan pada tahun 2024 yang bersumber dari APBD, BLUD dan APBN sejumlah Rp 284.326.727.486 dengan rincian belanja Operasi sejumlah Rp197.282.759.238,00 dan Belanja Modal Rp13.917.763.694,,00

1.4 Aspek dan Isu Strategis Perangkat Daerah

1.4.1. Aspek strategis

Aspek strategis organisasi adalah aspek yang mendukung dan merupakan sumber daya dalam upaya mencapai sasaran serta tujuan menuju perwujudan visi dan misi Bupati

1.4.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan analisa permasalahan kesehatan dan situasi kesehatan di Kabupaten Purworejo, Telaah Visi Misi Kepala Daerah, Telaah Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI, Telaah Kajian Tata Ruang Wilayah dan Lingkungan Strategis, serta analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan, maka ditentukan Isu-isu strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penurunan stunting, kematian ibu, bayi, dan balita
2. Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular
3. Peningkatan SPM Bidang Kesehatan
4. Perbaikan pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional
5. Penguatan Pelayanan Kesehatan

1.4. Sistematika Penulisan LKjIP

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Profil Organisasi
 - 1.3.1. Budaya Kerja
 - 1.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi
 - 1.3.3. Sumber Daya Manusia
 - 1.3.4. Sumber Daya Anggaran
- 1.4. Aspek dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 1.4.1. Aspek strategis
 - 1.4.2. Isu Strategis Perangkat Daerah
- 1.5. Sistematika Penulisan LKjIP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja PD
- 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan 2024
- 2.3. Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024
- 2.4. Perjanjian Kinerja tahun 2024

- 2.5. Hasil Tindak Lanjut Tahun 2023
- 2.6. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024
- 3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2024
- 3.3. Inovasi
- 3.4. Penghargaan

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja
- 4.2. Rencana Tindak Lanjut

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja PD

2.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan Misi. Dengan adanya tujuan akan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran yang dituju. Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo menetapkan sejumlah tujuan yang relevan untuk Misi ke satu dan ke empat yaitu Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

2.1.2. Sasaran

Untuk mencapai tujuan sebagaimana diungkapkan diatas, langkah selanjutnya menetapkan sasaran yang akan dicapai. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau kondisi yang ingin diwujudkan dalam jangka pendek yaitu dalam kegiatan operasional. Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo tahun 2023 adalah Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dan Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan.

2.1.3. Indikator Kinerja Perangkat daerah

Indikator Kinerja adalah ukuran atas keberhasilan yang ingin dicapai oleh perangkat daerah. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan perangkat daerah dalam mencapai tujuannya dan sasaran disusun berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Persen (%)	100
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	83

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan 2024

Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Jangka Menengah adalah sebagai berikut:

1. Strategi I : Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui-peningkatan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu secara terpadu pada seluruh tingkatan pemerintahan (kabupaten-kecamatan-desa).

Arah Kebijakan : Peningkatan Pelayanan dasar melalui Sistem Jaminan Sosial bidang Kesehatan.

2. Strategi II: Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan melalui penyuluhan dan promosi kesehatan.

Arah Kebijakan : Penyuluhan dan promosi kesehatan melalui satuan pendidikan dasar, Puskesmas, desa siaga, kader kesehatan dan masyarakat

3. Strategi III: Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 24 jam melalui pelayanan berdasar siklus daur kehidupan.

Arah Kebijakan : Pelayanan kesehatan berdasar siklus daur kehidupan dengan pelayanan skrining dan pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas sarana prasarana kesehatan dan Sumber Daya Manusia, Penguatan sistem Kesehatan, penanganan penyakit menular dan peningkatan kesehatan lingkungan.

2.3. Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2024

Struktur program dan kegiatan dan Sub Kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

Kode					Uraian	Jumlah Anggaran
					DINAS KESEHATAN	284.326.727.486
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	211.200.522.932
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	211.200.522.932
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	129.423.713.441
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81.319.600
1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.033.600
1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.066.000
1	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.630.800
1	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.955.000
1	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	8.530.800
1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.103.400
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	128.281.590.183
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	128.067.561.038
1	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.404.310
1	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	18.637.460
1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.183.880
1	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.401.900
1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	183.401.595
1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.515.800
1	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	630.000
1	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	645.000
1	02	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4.848.600
1	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.338.800
1	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.053.400

Kode					Uraian	Jumlah Anggaran
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.469.200
1	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.469.200
1	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7.000.000
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	286.666.800
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.875.900
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.658.900
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	106.722.000
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.629.400
1	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	8.529.000
1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.905.000
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	136.443.000
1	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.903.600
1	02	01	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21.406.500
1	02	01	2,07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.406.500
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	342.023.658
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	312.500
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	316.793.158
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.918.000
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	389.721.700
1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.950.000
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	151.370.000
1	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	5.000.000
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.855.000
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	62.280.000
1	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.275.700
1	02	01	2.09	0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	87.991.000
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	79.559.324.686
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	19.929.697.017
1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas	-
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	649.492.000
1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	10.330.871.040
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	-
1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-

Kode					Uraian	Jumlah Anggaran
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.021.736.054
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	354.875.000
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	5.520.355.963
1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	34.686.040
1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	17.680.920
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	59.405.117.566
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	218.306.700
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	105.555.400
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	150.665.800
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	34.383.600
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	52.909.040
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	22.548.500
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	28.912.300
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	16.290.570
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.460.323.900
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	12.184.500
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.179.042.000
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	39.165.150
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	22.795.313
1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	22.947.000
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.794.854.000
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	36.758.400
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	498.644.100
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	315.484.350
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	7.450.000
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	244.101.588
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	41.996.800
1	02	02	2.02	0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	13.732.200
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.787.993.920

Kode					Uraian	Jumlah Anggaran
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	48.370.470.433
1	02	02	2.02	0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	9.197.500
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	66.462.937
1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	404.190.200
1	02	02	2.02	0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	8.300.000
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	14.577.000
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	25.170.000
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	73.515.641
1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	-
1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	432.744.924
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	6.845.500
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	5.548.500
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	842.794.800
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	38.255.000
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	161.415.238
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	161.415.238
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	63.094.865
1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	21.022.215
1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	42.072.650
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.401.754.535
1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	55.358.640
1	02	03	2.01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	7.148.200
1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	48.210.440
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	117.634.045
1	02	03	2.02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	30.736.900
1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	86.897.145
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.228.761.850

Kode					Uraian	Jumlah Anggaran
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.228.761.850
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	506.148.445
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	63.730.000
1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	63.730.000
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	209.490.595
1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	209.490.595
1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	24.356.800
1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	24.356.800
1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	15.057.050
1	02	04	2.05	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	15.057.050
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	193.514.000
1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	193.514.000
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	309.581.825
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	136.850.125
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	136.850.125
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	33.384.500
1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	33.384.500

Kode					Uraian	Jumlah Anggaran
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	139.347.200
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	139.347.200

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Purworejo adalah :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Daerah Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	100%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	83

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 183.472.660.995,00	DAU
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 98.092.847.686,00	DAU, DBHCHT, DAK, DBH Pajak Rokok
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 1.401.754.535,00	DAU, DAK
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp 506.148.445,00	DAU, DAK
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp 853.326.825,00	DAU, DAK
	Jumlah	Rp 284.326.727.486,00	

2.5. Hasil Tindak Lanjut Tahun 2023

2.6. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Beberapa instrumen yang digunakan untuk mendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo antara lain:

1. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
Dalam mengelola keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Kabupaten Purworejo menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI yang merupakan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang mendukung pencapaian kinerja dalam penyusunan dokumen perencanaan, mengawal proses perencanaan, serta merespon aspirasi masyarakat. Selain itu aplikasi ini juga mendukung pencapaian kinerja dalam penyusunan dokumen rencana kerja anggaran (RKA).
2. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) telah digunakan untuk menginput pengadaan barang/jasa di Kabupaten Purworejo dan pengadaan barang dan jasa menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
3. Aplikasi Sawiji
4. Simo (Sistem Informasi Manajemen Obat) sebuah aplikasi berbasis web untuk mengelola obat dan perbekalan kesehatan di Instalasi Farmasi kabupaten dan 27 puskesmas. Simo Instalasi Farmasi dan puskesmas berjalan bersama seiringan dan hanya saling berhubungan saat puskesmas mengajukan permintaan obat dan Instalasi Farmasi memberikan droping/distribusi obat Sistem Informasi Obat
5. Simkeuda

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Analisis dan Capaian Kinerja tahun 2024

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Purworejo dilakukan secara berkala bulanan, semesteran dan tahunan dengan berdasar pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2024.

Tujuan dilakukan pengukuran kinerja adalah untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Purworejo. Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja program, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 77 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, implementasi Strategis Tahun 2024 mencakup pelaksanaan 5 program 22 kegiatan 99 sub kegiatan untuk mendukung seluruh sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo. Capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2024 dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Kesehatan
Kabupaten Purworejo Tahun 2024

NO	SASARAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	INTER PRETASI
I	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	100%	100%	100%	(O)
		13. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	100%	100%	(O)
		14. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	100%	100%	(O)
		15. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	100%	100%	(O)
		16. Pelayanan Kesehatan Balita	100%	100%	100%	(O)
		17. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100%	100%	100%	(O)
		18. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100%	100%	100%	(O)
		19. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100%	100%	100%	(O)

NO	SASARAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	INTER PRETASI
		20. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	100%	100%	(O)
		21. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%	100%	100%	(O)
		22. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100%	100%	100%	(O)
		23. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100%	100%	100%	(O)
		24. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100%	100%	100%	(O)
II	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	83	91,06	109 %	(O)

Tabel 3.2. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi pada awal periode perencanaan (Tahun 2022)	Kinerja Tahun 2023		Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja RPJMD (Tahun 2026)	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
				Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	69,85%	100%	100%	100%			100%		
		Rumus IKU = Jumlah realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama x 100%									
		Capaian Kinerja Tahun 2024								100%	(O)
		Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Tahun 2023								100 %	Relevan
		Hasil Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 terhadap Tahun 2023								121,58 %	Efektif
		Capaian Kinerja s.d. 2024 terhadap Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2026)								100%	O
		Capaian 2024 terhadap Standar Nasional	-	-	-	-	-	-	-	100%	
	Capaian Sasaran									100%	(O)

Sasaran Strategis Pemerintah Daerah “Kualitas Kesehatan” bertujuan untuk “Meningkatkan Kualitas SDM” merupakan salah satu upaya mencapai Misi pertama RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 yaitu “Meningkatkan Daya Saing Sumberdaya Manusia yang Unggul Dalam Arti Luas Mengedepankan Kompetensi Keahlian dan Keilmuan yang Berbasis Pada Religiusitas Masyarakat”. Sasaran Peangkat Daerah “Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan” yang bertujuan untuk menurunkan Angka Kematian dan Angka Kesakitan dinilai belum berhasil.

Capaian Indikator Sasaran Strategis Dinas Kesehatan yaitu Standar Pelayanan Minimal (SPM) dijabarkan dalam 12 parameter sebagai berikut:

Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil tercapai(100%)

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin tercapai(100%)
2. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir tercapai(100%)
3. Pelayanan Kesehatan Balita tercapai(100%)
4. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar tercapai(100%)
5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif tercapai(100%)
6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut tercapai(100%)
7. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi tercapai(100%)
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus tercapai(100%)
9. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat tercapai (100%)
10. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis tercapai(100%)
11. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) tercapai(100%)

Analisis Capaian Kinerja :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

- a. Penyebab keberhasilan kinerja adalah:
 - 1) Target sasaran adalah ibu hamil riil
 - 2) Frekwensi pemeriksaan kehamilan sesuai standar
- b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut adalah dengan:
 - 1) Bekerjasama dengan lintas sektor dan *stakeholder* terkait.
 - 2) Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi.
- c. Analisis program yang menyebabkan keberhasilan pencapaian kinerja dan tindak lanjut ke depan
Keberhasilan kinerja sasaran strategis tersebut disebabkan optimalnya pelaksanaan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja, Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil ke depan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo perlu:

- 1) Menyusun SOP penetapan/penghitungan sasaran/target.
- 2) Peningkatan Surveilans ibu hamil
- 3) Meningkatkan kerjasama lintas sektor
- 4) Mengusulkan insentif kader
- 5) Peningkatan kapasitas SDM dalam pelayanan KIA

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

a. Penyebab keberhasilan kinerja adalah:

- 1) Target sasaran adalah ibu bersalin riil
- 2) Persalinan sesuai standar

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut adalah dengan:

- 1) Bekerjasama dengan lintas sektor dan stakeholder terkait .
- 2) Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran.

c. Analisis program yang menyebabkan keberhasilan pencapaian kinerja dan tindak lanjut ke depan

Keberhasilan kinerja sasaran strategis tersebut disebabkan oleh optimalnya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja, Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin ke depan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo perlu:

- 1) Menyusun SOP penetapan/penghitungan sasaran/target
- 2) Pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan
- 3) Meningkatkan kerja sama lintas sektor dalam pemantapan P4K
- 4) Optimalisasi kemitraan dukun

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

a. Penyebab keberhasilan kinerja adalah :

- 1) Target sasaran adalah bayi baru lahir riil
- 2) Bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi.

c. Analisis program yang menyebabkan keberhasilan pencapaian kinerja dan tindak lanjut ke depan

Keberhasilan kinerja sasaran strategis tersebut disebabkan oleh optimalnya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja, Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir ke depan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo perlu:

- 1) Menyusun SOP penetapan/penghitungan sasaran/target
- 2) Sosialisasi kehalalan Imunisasi pada kelompok khusus
- 3) Peningkatan kerjasama lintas sektor
- 4) Optimalisasi kemitraan dukun

4. Pelayanan Kesehatan Balita

a. Penyebab keberhasilan kinerja adalah:

- 1) Target sasaran adalah balita riil
- 2) Layanan kesehatan balita sesuai standar

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi.

c. Analisis program yang menyebabkan keberhasilan pencapaian kinerja dan tindak lanjut ke depan

Keberhasilan kinerja sasaran strategis tersebut disebabkan oleh optimalnya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja, Pelayanan Kesehatan Balita ke depan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo perlu:

- 1) Menyusun SOP Penetapan sasaran
- 2) Sosialisasi kehalalan Imunisasi pada kelompok khusus
- 3) Sweeping balita yang tidak ke posyandu
- 4) Peningkatan kerjasama lintas sektor
- 5) Peningkatan kapasitas kader dalam skrining tumbuh kembang balita

5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

a. Penyebab keberhasilan kinerja adalah:

- 1) Usia Pendidikan Dasar mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar
- 2) Kerjasama lintas sektor optimal

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran.

- c. Analisis program yang menyebabkan keberhasilan pencapaian kinerja dan tindak lanjut ke depan

Keberhasilan kinerja sasaran strategis tersebut disebabkan oleh optimalnya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja, Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar ke depan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo perlu Ke depan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo perlu:

- 1) Pendataan dan *sweeping* anak tidak sekolah di wilayah
- 2) Pendataan dan kerjasama dengan Lembaga Pendidikan Non Formal
- 3) Penguatan TP-UKS tingkat Kabupaten
- 4) Penguatan TP-UKS tingkat Kecamatan
- 5) Peningkatan kerjasama lintas sektor

6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

- a. Penyebab keberhasilan kinerja adalah:

- 1) Pemahaman masyarakat tentang pentingnya skrining kesehatan
- 2) Ada kegiatan Posbindu Institusi

- b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi.

- c. Analisis program yang menyebabkan keberhasilan pencapaian kinerja dan tindak lanjut ke depan

Ketidakberhasilan kinerja sasaran strategis tersebut disebabkan oleh optimalnya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja, Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif ke depan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo perlu:

- 1) Penguatan sosialisasi pentingnya skrining kesehatan sampai ke masyarakat
- 2) Penguatan skrining Posbindu institusi dan masyarakat
- 3) Optimalisasi peran lintas sektor dalam mobilisasi sasaran
- 4) Pelatihan kader Posbindu PTM

7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

- a. Penyebab keberhasilan kinerja adalah:

- 1) Adanya pemahaman masyarakat tentang pentingnya skrining kesehatan usia lanjut
- 2) Partisipasi masyarakat

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi.

c. Analisis program yang menyebabkan keberhasilan pencapaian kinerja dan tindak lanjut ke depan

Keberhasilan kinerja sasaran strategis tersebut disebabkan oleh optimalnya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja, Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif ke depan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo perlu:

- 1) Penguatan sosialisasi dengan metode yang lebih tepat untuk merubah perilaku
- 2) Mobile Posyandu Lansia
- 3) Optimalisasi peran lintas sektor dalam mobilisasi sasaran.

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

a. Penyebab keberhasilan kinerja adalah:

- 1) Target sasaran adalah penderita hipertensi riil
- 2) Masyarakat melakukan kegiatan skrining PTM

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi.

c. Analisis program yang menyebabkan keberhasilan pencapaian kinerja dan tindak lanjut ke depan

Keberhasilan kinerja sasaran strategis tersebut disebabkan oleh optimalnya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja, Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi ke depan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo perlu:

- 1) Meningkatkan cakupan skrining faktor risiko PTM terintegrasi dengan kegiatan posyandu lansia
- 2) Optimalisasi peran lintas sektor dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan rutin

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

a. Penyebab keberhasilan kinerja adalah:

- 1) Penemuan kasus sama dengan target, karena kegiatan skriningnya tinggi
- 2) Kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan meningkat
- 3) Peran upaya promosi kesehatan dapat dipahami oleh masyarakat

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi.

c. Analisis program yang menyebabkan keberhasilan pencapaian kinerja dan tindak lanjut ke depan.

Keberhasilan kinerja sasaran strategis tersebut disebabkan oleh optimalnya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja, Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus ke depan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo perlu:

- 1) Penguatan sosialisasi pentingnya pelayanan kesehatan
- 2) Meningkatkan cakupan skrining faktor resiko PTM (usia produktif dan lansia)
- 3) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat
- 4) Mengoptimalkan kader kesehatan desa
- 5) Peningkatan kerjasama lintas program dan lintas sektor

10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

a. Penyebab keberhasilan kinerja adalah:

- 1) Penemuan kasus ODGJ berat sesuai sasaran
- 2) Kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus ODGJ dan pemantauan pengobatan rutin

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi.

c. Analisis program yang menyebabkan keberhasilan pencapaian kinerja dan tindak lanjut ke depan.

Keberhasilan kinerja sasaran strategis tersebut disebabkan oleh optimalnya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan

Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja, Pelayanan Kesehatan Penderita ODGJ Berat ke depan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo perlu:

Penguatan TPKJM (Tim Pembina Kesehatan Jiwa Masyarakat) tingkat Kabupaten dan Kecamatan

11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

a. Penyebab keberhasilan kinerja adalah:

- 1) Optimalisasi kegiatan skrining terduga TBC
- 2) Masyarakat mau dilakukan pemeriksaan dahak bila batuk

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan. Selain hal tersebut didukung juga dengan adanya anggaran dari sumber lain yaitu Global Fund ATM.

c. Analisis program yang menyebabkan keberhasilan pencapaian kinerja dan tindak lanjut ke depan.

Keberhasilan kinerja sasaran strategis tersebut disebabkan oleh optimalnya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja, Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis ke depan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo perlu:

- 1) Penguatan kader terlatih untuk pencarian suspek
- 2) Penambahan kader TB dan meningkatkan Kerjasama lintas program serta lintas sektor

12. Pelayanan Kesehatan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan manusia (HIV)

a. Penyebab keberhasilan kinerja

Kegiatan skrining HIV pada populasi berisiko (bumil, TBC dan WBP) dan populasi kunci (WPS, LSL, Waria) optimal.

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran. Selain hal tersebut didukung juga dengan adanya anggaran dari sumber lain yaitu Global Fund ATM.

c. Analisis program yang menyebabkan keberhasilan pencapaian kinerja dan tindak lanjut ke depan

Keberhasilan kinerja sasaran strategis tersebut disebabkan oleh optimalnya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan

Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja, Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis ke depan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo perlu:

- 1) Penguatan skrining HIV pada populasi berisiko (bumil, TBC dan WBP) dan populasi kunci (WBS, LSL, Waria) serta pekerja di tempat hiburan malam
- 2) Bekerjasama dengan penjangkau untuk mendata populasi kunci dan skrining pada populasi kunci (WBS, LSL, Waria) serta pekerja di tempat hiburan malam
- 3) Peningkatan kerjasama lintas program dan lintas sector

Tabel 3.3. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi pada awal periode perencanaan (Tahun 2022)	Kinerja Tahun 2023		Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja RPJMD (Tahun 2026)	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
				Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	89,66	84,11	102,57	83	91,06	109	86		
		Rumus IKU = Nilai Hasil survey kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara terhadap 9 (sembilan) unsur penilaian									
		Capaian Kinerja Tahun 2024									
		Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Tahun 2023									
		Hasil Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 terhadap Tahun 2023									
		Capaian Kinerja s.d. 2023 terhadap Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2026)									
		Capaian 2022 terhadap Standar Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Capaian Sasaran									107,57%	O

Sasaran strategis Pemerintah Daerah “Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel” bertujuan untuk “Meningkatkan Tata Kelola Kelembagaan” merupakan salah satu upaya mencapai Misi keempat RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 yaitu “Meningkatkan Daya Saing Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (*good governance*)”. Sasaran Perangkat Daerah “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan” yang bertujuan untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dinilai berhasil.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap Indikator Strategis yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan kriteria tercapai(109 %)

a. Analisis yang mendukung keberhasilan kinerja

- 1) Terdapat Standar Pelayanan Operasional.
- 2) Petugas memberikan pelayanan sesuai SOP
- 3) Respon cepat terhadap keluhan pelanggan

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar (7,41%) atau sebesar Rp 15.176.690.148 dari anggaran sebesar Rp 204.604.259.057 digunakan sebesar Rp 189.427.568.909

c. Analisis program yang menyebabkan keberhasilan pencapaian kinerja dan tindak lanjut ke depan

Program yang mendukung pencapaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Ke depan Dinas Kesehatan akan melakukan perbaikan dengan:

- 1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur
- 2) Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja
- 3) Meningkatkan implementasi *reward* dan *punishment* dalam pelaksanaan kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung dalam pencapaian Indikator Sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan:

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 9) Peningkatan Pelayanan BLUD

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan:

- 1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota
- 2) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
- 4) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Kegiatan:

- 1) Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di wilayah Kabupaten/Kota
- 2) Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM manusia di wilayah Kabupaten /Kota
- 3) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Kegiatan:

- 1) Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
- 2) Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
- 3) Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah /Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
- 4) Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Kegiatan:

- 1) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Pelaksanaan sehat Dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten Kota
- 3) Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumbr Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Kabupaten/Daerah

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET			REALISASI			CAPAIAN %	PERMASALAHAN	UPAYA PENGATASIAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					6	7	8	9	10	11				
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Dinas Kesehatan	4	5					10					13
1				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	%	100	100,00%					
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	dokumen	6	100,00%					
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	Dokumen	15	100,00%					
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	100,00%					
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	100,00%					

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET			REALISASI			CAPAIAN %	PERMASALAHAN	UPAYA PENGATIHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	100,00%			
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	100,00%			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Laporan	100,00%			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	100,00%			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.405	Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.405	Orang/bulan	100,00%			
				Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	100,00%			
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	24	Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	24	Dokumen	100,00%			

NO	URUSAN PEMERIN TAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET		REALISASI			CAPAIAN %	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	100,00%			
				Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan	1	Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan	1	100,00%			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26	100,00%			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	100	%	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	100	100,00%			
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	100,00%			
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan	1	Dokumen	Jumlah Dokumen Pengamanan	1	100,00%			

NO	URUSAN PEMERIN TAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEB IJA KAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET			REALISASI			CAPAIAN %	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI PERMASALA HAN	TINDAK LANJUT REKOM ENDASI DPRD
					Barang Milik Daerah SKPD			Barang Milik Daerah SKPD						
				Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Lapora n	1	Lapora n	100,00%				
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Lapora n	1	Lapora n	100,00%				
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Lapora n	1	Lapora n	100,00%				
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	100	%	100,00%				
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokum en	1	Dokum en	100,00%				
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokum en	1	Dokum en	100,00%				
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum	100	%	100	%	100,00%				

NO	URUSAN PEMERIN TAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEB IJA KAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET			REALISASI			CAPAIAN %	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI PERMASALA HAN	TINDAK LANJUT REKOM ENDASI DPRD
					Perangkat Daerah			Perangkat Daerah						
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	100,00%			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	100,00%			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	100,00%			
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	100,00%			
				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket	100,00%			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	100,00%			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	100,00%			
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	100,00%			
				Pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan	3	Jenis	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan	3	Jenis	100,00%			

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN %	PERMASALAHAN	UPAYA PENGATASIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah yang Diadakan			Pemerintah Daerah yang Diadakan				
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	Unit	100,00%	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	Laporan	100,00%	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	100,00%	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	100,00%	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	100,00%	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	7	Jenis	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	7	Jenis	100,00%	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	1	Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	1	Unit	100,00%	

NO	URUSAN PEMERIN TAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEB IJA KAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN %	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI PERMASALA HAN	TINDAK LANJUT REKOM ENDASI DPRD
				atau Kendaraan Dinas Jabatan	dan dibayarkan Pajaknya		dan dibayarkan Pajaknya					
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	100,00%			
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	122	Jumlah Mebel yang Dipelihara	122	100,00%			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	64	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	64	100,00%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	100,00%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	100,00%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	1,71 12	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	1,71 12	100,00%			
				Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Layanan BLUD	100	Persentase Layanan BLUD	100	100,00%			
				Pelayanan dan Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Peningkatan Pelayanan	27	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Peningkatan Pelayanan	27	100,00%			

NO	URUSAN PEMERIN TAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEB IJA KAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET		REALISASI			CAPAIAN %	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI PERMASALA HAN	TINDAK LANJUT REKOM ENDASI DPRD
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	%	Persentase Ketercapaian Faskes yang Menyelenggarakan Pelayanan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan	100	%	100,00%			
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	30	Unit	Fasilitas Kesehatan dan Lembaga yang Mendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan Sesuai Standar	30	Unit	100,00%			
				Pengembangan Puskesmas	1	Unit	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Alat Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1	Unit	100,00%			
				Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	Unit	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Alat Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1	Unit	100,00%			

NO	URUSAN PEMERIN TAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEB IJA KAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET			REALISASI			CAPAIAN %	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI PERMASALA HAN	TINDAK LANJUT REKOM ENDASI DPRD
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	200	Unit	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	200	Unit	100,00%			
				Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	300	Unit	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	300	Unit	100,00%			
				Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medik Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	-Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medik Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	72	Paket	-Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medik Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	72	Paket	100,00%			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	-Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Dintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	29300	Keluarga	-Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Dintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	29303	Keluarga	100,01%			

NO	URUSAN PEMERIN TAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEB IJA KAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET			REALISASI			CAPAIAN %	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI PERMASALA HAN	TINDAK LANJUT REKOM ENDASI DPRD
				Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang di Distribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	27	Paket	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang di Distribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	27	Paket	100,00%			
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesehatan yang Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Sesuai Standar	29	Unit	Kesehatan yang Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Sesuai Standar	29	Unit	100,00%			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9.109	Orang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6268	Orang	68,81%	1. Perencanaan sasaran ibu hamil lebih tinggi dari pada penemuan ibu hamil riil 2. K1 Akses 3. Frekwensi pemeriksaan kehamilan tidak memenuhi standar	1. Peningkatan Surveilans Ibu Hamil 2. Peningkatan kerjasama lintas sektor. 3. Peningkatan kapasitas SDM dalam pelayanan KIA	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9.340	Orang	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6333	Orang	67,81%	1. Perencanaan sasaran ibu bersalin lebih tinggi dari pada ibu bersalin riil 2. Persalinan Non Faskes	1. Pembinaan dan peningkatan kapasitas Tenaga Kesehatan 2.	

NO	URUSAN PEMERIN TAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEB IJA KAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET			REALISASI			CAPAIAN %	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI PERMASALA HAN	TINDAK LANJUT REKOM ENDASI DPRD
												3. Persalinan Dukun	Peningkatan kerjasama lintas sektor dalam pemantauan P4K 3. Optimalisasi kemitraan dukun.	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9082	Orang	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	669 7	Orang	73,74%	1. Perencanaan sasaran bayi baru lahir lebih tinggi dari pada bayi baru lahir ril 2. Penolakan imunisasi HB 0 3. Persalinan dukun	1. Sosialisasi kehalalan Imunisasi pada kelompok khusus. 2. Peningkatan kerjasama lintas sektor 3. Optimalisasi kemitraan dukun	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44.8 81	Orang	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	385 31	Orang	85,85%	1. Perencanaan sasaran balita lebih tinggi dari pada balita ril 2. Penolakan imunisasi	1. Sosialisasi kehalalan Imunisasi pada kelompok khusus. 2. Peningkatan kerjasama lintas sektor 3. Peningkatan Kapasitas Kader dalam skringing tumbuh kembang balita 4. Sweeping balita yang tidak ke posyandu.	

NO	URUSAN PEMERIN TAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEB IJA KAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET			REALISASI			CAPAIAN %	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI PERMASALA HAN	TINDAK LANJUT REKOM ENDASI DPRD
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	126. 951	Orang	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	985 74	77,65%	Orang	1. Usia Pendidikan Dasar yang tidak sekolah belum terdata dan terskrining. 2. Usia Pendidikan dasar di Lembaga Pendidikan Non Formal belum terjangkau layanan. 3. Kurangnya kordinasi dengan Dindikbud dan Kemenag	1. Pendataan dan sweeping anak tidak sekolah di wilayah 2. Pendataan dan kerjasama dengan Lembaga Pendidikan Non Formal 3. Penguatan TP-UKS tingkat Kabupaten 4. Penguatan TP-UKS tingkat Kecamatan	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5217 46	Orang	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	268 398	51,44%	Orang	1. Kurang Sosialisasi pentingnya skrining kesehatan sampai ke masyarakat. 2. Kurang maksimalnya kegiatan posbindu institusi	1. Penguatan sosialisasi pentingnya skrining kesehatan sampai ke masyarakat 2. Penguatan skrining posbindu ke institusi dan masyarakat 3. Pelatihan kader Posbindu PTM 4. Optimalisasi peran lintas sektor dalam mobilisasi sasaran.	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan	132. 742	Orang	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan	118 381	89,18%	Orang	1. Kurang Sosialisasi pentingnya pelayanan kesehatan usia	1. Penguatan Sosialisasi dengan metoda yang lebih tepat	

NO	URUSAN PEMERIN TAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEB IJA KAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN %	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI PERMASALA HAN	TINDAK LANJUT REKOM ENDASI DPRD
				Kesehatan Sesuai Standar		Kesehatan Sesuai Standar		Kesehatan Sesuai Standar		lanjut sampai ke masyarakat. 2. Mobilisasi lansia terbatas. 3. Partisipasi masyarakat kurang	untuk merubah perilaku. 2. Mobile Posyandu Lansia 3. Optimalisasi peran lintas sektor dalam mobilisasi sasaran.	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2617 28	Orang	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 812 52	Orang	31,04%	1. Penemuan kasus tidak sesuai target, karena kegiatan skrining nya masih rendah 2. Masyarakat tidak merasa sakit, sehingga tidak melakukan kegiatan skrining PTM	1. Meningkatkan cakupan skrining faktor resiko PTM terintegrasi dengan kegiatan posbindu dan posyandu lansia 2. Optimalisasi peran lintas sektor dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk pemeriksaan rutin.	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 9974	Orang	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 118 76	Orang	119,07%			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 6222	Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 413 8	Orang	66,51%	1. Penemuan kasus ODGJ berat masih rendah 2. Kurangnya	Penguatan TPKJM (Tim Pembina Kesehatan Jiwa	

NO	URUSAN PEMERIN TAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEB IJA KAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN %	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI PERMASALA HAN	TINDAK LANJUT REKOM ENDASI DPRD
				Gangguan Jiwa Berat	Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			kesadaram masyarakat untuk melaporkan kasus ODGJ dan pemantauan pengobatan rutin 3. Masih ada penderita dipasung	Masyarakat tingkat Kabupaten dan Kecamatan	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9.418	Orang	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9923	Orang	105,36%	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	11.255	Orang	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	8286	Orang	73,62%	Pencermatan ulang dalam penyusunan estimasi sasaran
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	29	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	29	Dokumen	100,00%	

NO	URUSAN PEMERIN TAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEB IJA KAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET			REALISASI			CAPAIAN %	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI PERMASALA HAN	TINDAK LANJUT REKOM ENDASI DPRD
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	27	Dokum en	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	27	Dokum en	100,00%			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27	Dokum en	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27	Dokum en	100,00%			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	Dokum en	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	Dokum en	100,00%			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2	Dokum en	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2	Dokum en	100,00%			
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	29	Dokum en	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	29	Dokum en	100,00%			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri	90	Dokum en	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional,	90	Dokum en	100,00%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIDAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN %	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				dan Tradisional Lainnya	Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya					
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2	Dokumen	2	100,00%			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	-Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	14.040	Orang	12457	88,73%	Hasil skrining terhadap sasaran belum akurat karena jawaban yang diberikan belum sesuai kondisi sebenarnya.	Perlu adanya peningkatan pemahaman terkait kesehatan jiwa baik di sasaran maupun SDM agar hasil skrining bisa optimal	
				Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1	Dokumen	1	100,00%			
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4	Dokumen	4	100,00%			
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4	Dokumen	4	100,00%			
				Deteksi Dini Penyalahgunaan	Jumlah Orang yang Menerima	6.750	Orang	6767	100,25%			

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIDAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN %	PERMASALAHAN	UPAYA PENGATAS PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah		Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah					
				Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	208	Paket	165	79,33%	Jumlah kasus yang memerlukan pemeriksaan dan pengiriman sampel lebih sedikit dari sasaran	Tetap meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kasus agar tidak tinggi (kerjasama lintas sektor dan program)	
				Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	3	Dokumen	3	100,00%			
				Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	22	Unit	22	100,00%			

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET			REALISASI			CAPAIAN %	PERMASALAHAN	UPAYA PENGATASIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	Dokumen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	Dokumen	100,00%			
				Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	29	Unit	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	29	Unit	100,00%			
				Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1	Laporan	100,00%			
				Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	27	Unit	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	27	Unit	100,00%			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1744	Orang	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1141	Orang	65,42%	1. Pengobatan TB lama sehingga pasien bosan/enggat minum obat sampai 6 bulan 2. Setelah minum obat dan membaik pasien menghentikan	Pendampingan pengobatan kepada pasien baik dari keluarga maupun kader dalam kepatuhan minum obat	

NO	URUSAN PEMERIN TAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEB IJA IJAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET			REALISASI			CAPAIAN %	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOM ENDASI DPRD
												pengobatan sebelum 6 bulan		
												1. Stigma hiv di masyarakat masih tinggi 2. Kesadaran untuk melakukan skrining masih rendah 3. Kegiatan skrining belum optimal pada populasi kunci, kegiatan skrining masih di ibu hamil, warga binaan dan pasien TBC	Kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus HIV	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV) *	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8179	Orang	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	89	Orang	1,09%			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria *	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	202	Orang	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	10	Orang	4,95%	Jumlah kasus lebih sedikit dari sasaran	Kerjasama lintas program dan sektor untuk upaya pencegahan dan penanganan kasus malaria	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	Dokumen	-Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	Dokumen	100,00%			
				Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	Dokumen	-Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	Dokumen	100,00%			
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	Sistem Informasi Kesehatan yang Terintegrasi	1	Sistem	Sistem Informasi Kesehatan yang Terintegrasi	1	Sistem	100,00%			

NO	URUSAN PEMERIN TAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEB IJA KAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET			REALISASI			CAPAIAN %	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI PERMASALA HAN	TINDAK LANJUT REKOM ENDASI DPRD
				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	3	dokum en	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	3	dokum en	100,00%			
				Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Mendapat Rekomendasi Izin Operasional	100	%	Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Mendapat Rekomendasi Izin Operasional	100	%	100,00%			
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang dikendalikan, Diawasi dan Tindak Lanjuti Perizinannya	66	Unit	Jumlah Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang dikendalikan, Diawasi dan Tindak Lanjuti Perizinannya	66	Unit	100,00%			
				Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	66	Unit	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	66	Unit	100,00%			
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang Memiliki Kapasitas Kompetensi Sesuai Standar	96	%	Persentase SDM Kesehatan yang Memiliki Kapasitas Kompetensi Sesuai Standar	96,15	%	100,16%			
				Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Tenaga Kesehatan yang Memiliki Izin Praktik	3650	Orang	Tenaga Kesehatan yang Memiliki Izin Praktik	952	Orang	26,08%	Jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di Fasyankes telah memiliki Surat	Mencermati kembali penentuan sasaran sesuai	

NO	URUSAN PEMERIN TAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEB IJA KAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI PERMASALA HAN	TINDAK LANJUT REKOM ENDASI DPRD
								Izin Praktik yg berlaku 5 tahun sudah diterbitkan sesuai mencukupi kebutuhan pelayanan, Pengajuan dan perpanjangan SIP sesuai dengan kebutuhan tenaga kesehatan Fasyankes di Kab.Punworejo, adanya perubahan UU 17 Tahun 2023 ttg kesehatan yg terbit bulan Agustus 2023 dg pemberlakuan bertahap yg mengecualikan tenaga kesehatan selain vokasi dan profesi tdk diharuskan mengurus SIP serta adanya pergantian aplikasi daerah ke aplikasi pusat yg masih terjadi kendala integrasi pelayanan	regulasi terbaru	
				Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan 1	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan 1	100,00%			

NO	URUSAN PEMERIN TAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEB IJA IJAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET		REALISASI			CAPAIAN %	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI PERMASALA HAN	TINDAK LANJUT REKOM ENDASI DPRD
					Praktik Tenaga Kesehatan		Praktik Tenaga Kesehatan						
				Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1	Dokum en	1	Dokum en	100,00%			
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan dan Profil SDM Kesehatan	1	Dokum en	1	Dokum en	100,00%			
				Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dinas Kesehatan)	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	Dokum en	1	Dokum en	100,00%			
				Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	Dokum en	1	Dokum en	100,00%			
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	SDM Kesehatan yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kompetensi	250	Orang	302	Orang	120,80%			

NO	URUSAN PEMERIN TAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEB IJA KAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET			REALISASI			CAPAIAN %	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI PERMASALA HAN	TINDAK LANJUT REKOM ENDASI DPRD
				Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	250 orang		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	302 orang	120,80%				
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Peredaran Obat, Alat Kesehatan dan Optikal serta Makanan yang Aman dan Bermutu	100 %		Persentase Peredaran Obat, Alat Kesehatan dan Optikal serta Makanan yang Aman dan Bermutu	100 %	100,00%				
				Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal serta UMOT yang Memiliki Izin	95 Sarana		Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal serta UMOT yang Memiliki Izin	95 Sarana	100,00%				
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	3 Dokumen		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	3 Dokumen	100,00%				
				Penerbitan Sertifikat Produksi	Sertifikat Produksi	72 %		Sertifikat Produksi	72 %	100,00%				

NO	URUSAN PEMERIN TAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEB IJA KAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN %	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI PERMASALA HAN	TINDAK LANJUT REKOM ENDASI DPRD
				Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pangan Industri Rumah Tangga		Pangan Industri Rumah Tangga					
				Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100	100,00%			
				Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran	Pembinaan TPM Sesuai Standar	5	Pembinaan TPM Sesuai Standar	5	100,00%			

NO	URUSAN PEMERIN TAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEB IJA KAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET			REALISASI			CAPAIAN %	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI PERMASALA HAN	TINDAK LANJUT REKOM ENDASI DPRD
				dan Depot Air Minum (DAM)										
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1	Dokum en	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1	Dokum en	100,00%				
				Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	100	Stiker Pembinaan	Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	100	Stiker Pembinaan	100,00%				
				Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	100	Dokum en	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	100	Dokum en	100,00%				
				Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post	83	%	Pengawasan Makanan yang Aman dan Bermutu	83	%	100,00%				

NO	URUSAN PEMERIN TAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEB IJA KAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET			REALISASI			CAPAIAN %	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI PERMASALA HAN	TINDAK LANJUT REKOM ENDASI DPRD
				Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga										
				Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Tindak Lanjut Pengawasan	80	Unit	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	80	Unit	100,00%				
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	36	%	Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri	39,07	%	108,53%				
				Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	16	Kecamatan	Pelaksanaan Kegiatan Pokjanal Desa Siaga di Tingkat Kecamatan	16	Kecamatan	100,00%				
				Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	16	Dokumen	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	16	Dokumen	100,00%				
				Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat	383	Desa	Peningkatan Jumlah Desa Sehat Utama dan Mandiri	468	Desa	122,19%				

NO	URUSAN PEMERIN TAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEB IJA KAN	URAIAN PROGRAM/ PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET			REALISASI			CAPAIAN %	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI PERMASALA HAN	TINDAK LANJUT REKOM ENDASI DPRD
				Daerah Kabupaten/ Kota										
				Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1	Dokum en	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1	Dokum en	100,00%			
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Posyandu Aktif	133	Desa	Jumlah Posyandu Aktif	493	Desa	370,68%			
				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Bagelen	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	Dokum en	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	Dokum en	100,00%			

3.2. Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

a. Pendapatan

Realisasi Pendapatan yang diperoleh yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp. 31.928.500,00 atau 203,37% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 15.700.000,00

Perincian lebih lanjut anggaran dan realisasi pendapatan tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Retribusi Daerah	10.000.000,00	20.528.500,00	205,29	4.440.000,00
2	Lain-lain PAD yang sah	5.700.000,00	11.400.000,00	200,00	234.013.545.279,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.700.000,00	31.928.500,00	203,37	234.017.985.279,00

b. Belanja

Realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp. 199.271.465.920,00 atau 94,35% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 211.200.522.932,00

Perincian lebih lanjut anggaran dan realisasi belanja tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.5 Anggaran dan Realisasi Belanja

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Belanja Operasi	197.282.759.238,00	185.482.248.921,00	94,02	385.147.380.972,00
	Belanja Pegawai	128.079.121.038,00	121.753.615.387,00	95,06	162.095.811.031,00
	Belanja Barang Jasa	69.083.638.200,00	63.612.216.734,00	92,08	222.932.529.941,00
	Belanja Hibah	120.000.000,00	116.416.800,00	97,01	119.040.000,00
2	Belanja Modal	13.917.763.694,00	13.789.216.999,00	99,08	22.642.586.699,00
	Belanja Peralatan dan Mesin	5.045.847.294,00	4.990.607.770,00	98,91	19.561.233.679,00
	Belanja Bagunan dan Gedung	8.859.213.000,00	8.785.959.229,00	99,17	3.081.353.020,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.703.400,00	12.650.000,00	99,58	0,00
Jumlah Belanja		211.200.522.932,00	199.271.465.920,00	94,35	407.789.967.671,00

Sedangkan rincian anggaran dan realisasi belanja langsung per kegiatan tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Per Sub Kegiatan

No	URAIAN URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN		%
		TARGET	REALISASI	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		129.423.713.441	122.747.117.391	194,84
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81.319.600	60.389.138	74,26
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.033.600	33.949.538	84,80
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.066.000	2.716.000	66,80
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.630.800	5.880.800	88,69
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.955.000	7.144.800	89,82
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	8.530.800	7.750.800	90,86
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.103.400	2.947.200	20,90
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	128.281.590.183	121.902.269.685	95,03
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	128.067.561.038	121.744.095.387	95,06
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.404.310	4.816.700	75,21
9	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	18.637.460	11.317.200	60,72
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.183.880	554.400	17,41
11	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.401.900	1.369.000	57,00
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	183.401.595	140.116.998	76,40
iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.515.800	9.415.200	89,53
13	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	630.000	-	0,00
14	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	645.000	645.000	100,00
15	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4.848.600	4.843.000	99,88
16	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.338.800	3.338.800	100,00
17	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.053.400	588.400	55,86
iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.469.200	5.086.200	48,58
18	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.469.200	3.461.200	99,77
19	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7.000.000	1.625.000	23,21
v	Administrasi Umum Perangkat Daerah	286.666.800	225.035.787	78,50
20	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.875.900	5.502.100	93,64
21	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.658.900	8.658.900	100,00
22	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	106.722.000	96.646.200	90,56
23	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.629.400	8.629.400	100,00

No	URAIAN URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN		%
		TARGET	REALISASI	
24	Penyediaan Bahan/Material	8.529.000	8.451.700	99,09
25	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.905.000	6.486.000	82,05
26	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	136.443.000	89.772.887	65,80
27	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.903.600	888.600	22,76
vi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21.406.500	20.820.000	97,26
28	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.406.500	20.820.000	97,26
vii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	342.023.658	262.053.929	76,62
30	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	312.500	189.500	60,64
31	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	316.793.158	238.054.399	75,15
32	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.918.000	23.810.030	95,55
viii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	389.721.700	262.047.452	67,24
33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.950.000	19.285.525	48,27
34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	151.370.000	98.236.346	64,90
35	Pemeliharaan Mebel	5.000.000	4.960.000	99,20
36	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.855.000	21.300.000	53,44
37	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	62.280.000	32.143.581	51,61
38	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.275.700	2.691.000	82,15
39	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	87.991.000	83.431.000	94,82
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		79.559.324.686	74.757.981.431	93,97
i	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	19.929.697.017	19.216.786.755	96,42
	Pengembangan Puskesmas	649.492.000	632.577.500	
40	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	10.330.871.040	10.248.181.429	99,20
43	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.021.736.054	2.987.359.270	98,86
47	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	354.875.000	345.024.400	97,22
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	5.520.355.963	4.952.778.956	89,72
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	34.686.040	33.506.700	96,60

No	URAIAN URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN		%
		TARGET	REALISASI	
48	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	17.680.920	17.358.500	98,18
ii	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	59.405.117.566	55.319.835.356	93,12
49	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	218.306.700	200.832.940	92,00
50	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	105.555.400	93.940.300	89,00
51	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	150.665.800	17.188.200	11,41
52	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	34.383.600	31.034.900	90,26
53	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	52.909.040	47.772.000	90,29
54	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	22.548.500	20.916.800	92,76
55	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	28.912.300	24.537.400	84,87
56	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	16.290.570	11.564.400	70,99
57	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.460.323.900	1.457.292.400	99,79
58	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	12.184.500	7.349.000	60,31
59	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.179.042.000	1.166.097.400	98,90
60	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	39.165.150	32.953.171	84,14
61	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	22.795.313	13.353.400	58,58
62	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	22.947.000	7.361.200	32,08
63	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.794.854.000	2.738.351.400	97,98
64	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	36.758.400	22.830.200	62,11
65	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	498.644.100	462.923.990	92,84
66	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	315.484.350	281.102.500	89,10
67	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	7.450.000	5.450.000	73,15
68	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	244.101.588	164.241.400	67,28
69	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	41.996.800	38.717.800	92,19
71	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	13.732.200	9.631.000	70,13

No	URAIAN URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN		%
		TARGET	REALISASI	
72	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.787.993.920	1.385.429.382	77,49
73	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	48.370.470.433	45.445.901.586	93,95
74	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	9.197.500	8.188.000	89,02
75	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	66.462.937	45.848.816	68,98
76	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	404.190.200	303.386.251	75,06
77	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	8.300.000	6.384.300	76,92
78	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	14.577.000	13.912.000	95,44
79	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	25.170.000	20.303.800	80,67
80	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	73.515.641	35.220.199	47,91
81	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	432.744.924	371.314.470	85,80
82	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	6.845.500	2.870.400	41,93
83	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)	5.548.500	4.898.400	88,28
84	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	842.794.800	802.765.751	95,25
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	38.255.000	17.970.200	46,97
iii	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	161.415.238	160.251.240	99,28
86	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	161.415.238	160.251.240	99,28
iv	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	63.094.865	61.108.080	96,85
88	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	21.022.215	19.877.500	94,55
89	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	42.072.650	41.230.580	98,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		1.401.754.535	1.169.640.231	83,44
i	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	55.358.640	44.018.278	79,51
91	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	7.148.200	6.712.678	93,91
92	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	48.210.440	37.305.600	77,38
ii	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia	117.634.045	60.670.300	51,58

No	URAIAN URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN		%
		TARGET	REALISASI	
	Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			
93	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	30.736.900	13.993.500	45,53
94	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	86.897.145	46.676.800	53,71
iii	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.228.761.850	1.064.951.653	86,67
95	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.228.761.850	1.064.951.653	86,67
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	506.148.445	344.947.808	68,15
i	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	63.730.000	39.401.200	61,83
96	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	63.730.000	39.401.200	61,83
ii	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	209.490.595	172.645.100	82,41
99	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	209.490.595	172.645.100	82,41
iii	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	24.356.800	10.172.214	41,76
100	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	24.356.800	10.172.214	41,76
iv	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	15.057.050	9.811.500	65,16
101	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	15.057.050	9.811.500	65,16
v	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan	193.514.000	112.917.794	58,35

No	URAIAN URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN		%
		TARGET	REALISASI	
	Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			
102	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	193.514.000	112.917.794	58,35
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		309.581.825	258.254.859	83,42
i	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	136.850.125	118.226.809	86,39
103	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	136.850.125	118.226.809	86,39
ii	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	33.384.500	29.817.100	89,31
104	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	33.384.500	29.817.100	89,31
iii	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	139.347.200	110.210.950	79,09
105	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	139.347.200	110.210.950	79,09
Jumlah : 105 Sub Kegiatan		211.200.522.932	199.271.465.920	94,35

3.3. Inovasi

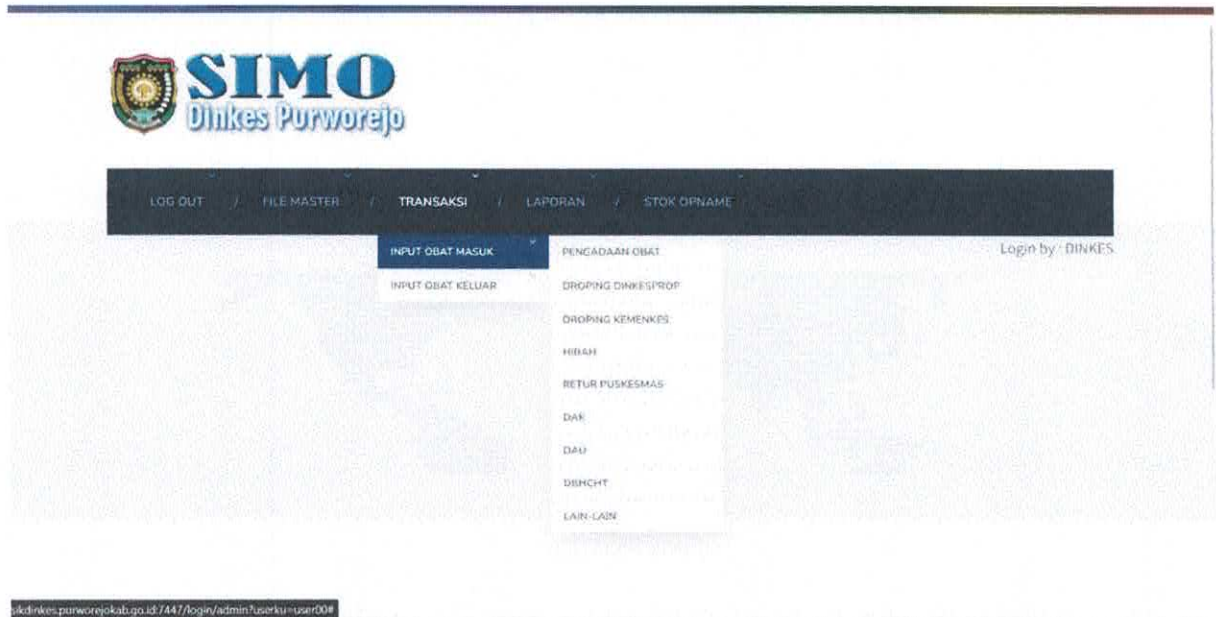
Inovasi merupakan upaya mencari solusi atas permasalahan, kendala dan tantangan yang ada serta optimalisasi potensi sumber daya yang ada untuk lebih efektif dan efisien. Inovasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. SIMO

Inovasi Simo (Sistem Informasi Manajemen Obat) sebuah aplikasi berbasis web untuk mengelola obat dan perbekalan kesehatan di Instalasi Farmasi kabupaten dan 27 puskesmas. Simo Instalasi Farmasi dan puskesmas berjalan bersama seiringan dan hanya saling berhubungan saat puskesmas mengajukan permintaan obat dan Instalasi Farmasi memberikan dropping/distribusi obat. Selain saat saat tersebut, simo di masing masing sarana mengelola mutasi masuk dan mutasi keluar obat di sarana tersebut.

Kelebihan aplikasi ini adalah berbasis web sehingga bisa diakses di komputer dan di mana saja serta kapan saja selama terhubung internet. Saat ini SIMO di Instalasi Farmasi bisa melihat stok riil puskesmas dan bisa memunculkan data obat ED s.d 6 bulan ke depan sbg alat pengendali persediaan obat, sehingga jumlah obat ED dapat dikurangi serta mampu merencanakan obat lebih optimal utk menghindari kekosongan obat.

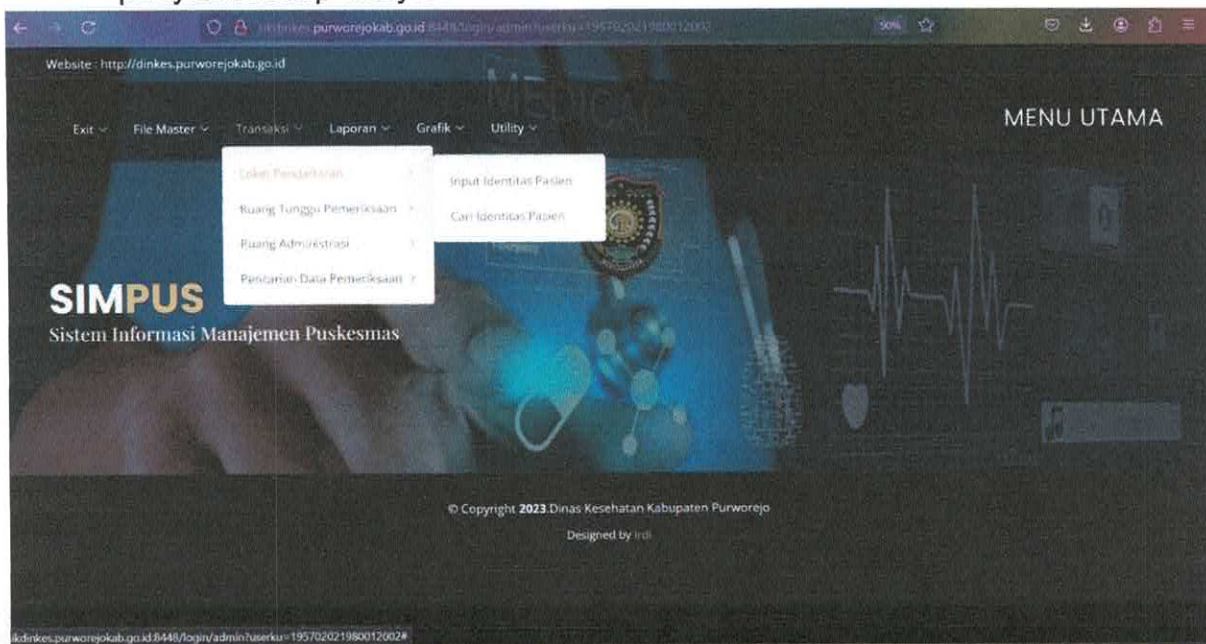


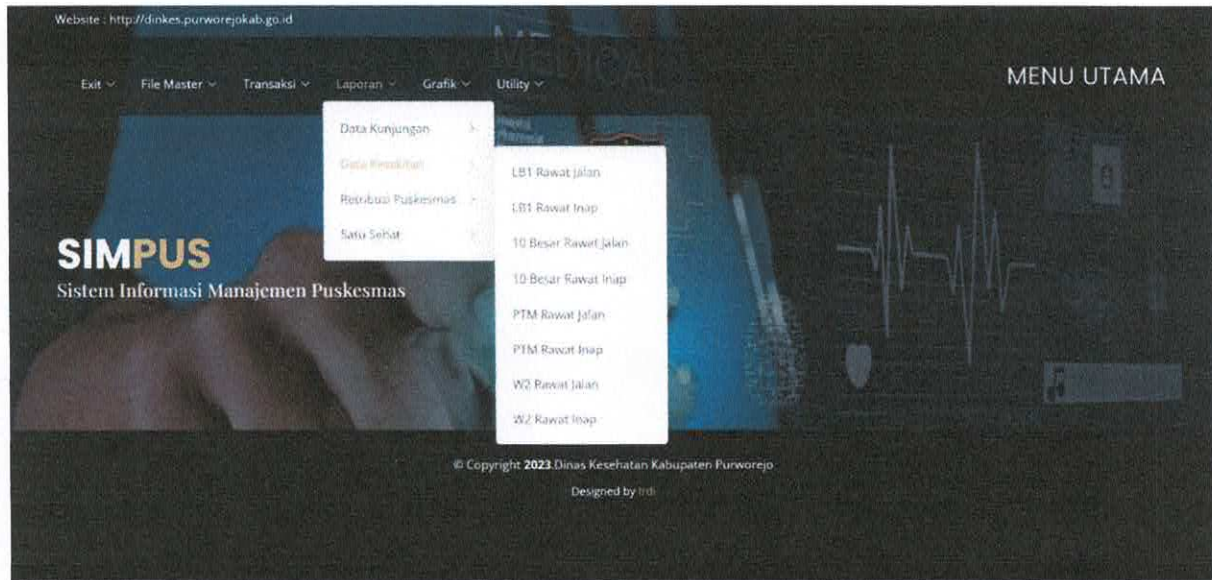


2. SIMAESTRO

Inovasi Simaestro adalah sebuah inovasi berupa aplikasi rekam medis elektronik untuk 27 Puskesmas yang ter bridging dengan aplikasi P Care BPJS Kesehatan dan Satu Sehat dari Kementerian Kesehatan. Aplikasi ini berfungsi sebagai

- rekam medis elektronik untuk skrining orang sehat (Pemeriksaan Kesehatan Gratis) dan rekam medis untuk pelayanan orang sakit.
- untuk pemenuhan kebutuhan data 10 besar penyakit dan gambaran peta penyakit setiap wilayah





3.4. Penghargaan

Penghargaan adalah perangsang maupun motivasi guna mengembangkan kinerja yang dicapai individu maupun organisasi. Penghargaan yang diterima Dinas Kesehatan kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut :

1. Penghargaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik



2. Penghargaan Pencapaian Universal health coverage (UHC)



BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan cerminan pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo. Keberhasilan yang dicapai merupakan hasil kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan bisa ditingkatkan.

4.1. Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan dari 13 (tiga belas) Indikator Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo tahun 2024 sudah tercapai semua, akan tetapi untuk ke depan masih diperlukan upaya perbaikan/penyempurnaan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran tersebut.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian Indikator Sasaran antara lain:

1. Beban kerja SDM tinggi karena tidak terpenuhinya standar ketenagaan minimal
2. Ketersediaan sarana prasarana kesehatan di Puskesmas belum sesuai dengan standar pelayanan kesehatan
3. Jaringan kemitraan dengan berbagai pihak termasuk sektor pemerintah dan dunia usaha dalam penanganan masalah kesehatan perlu dioptimalkan
4. Peran serta masyarakat (pemberdayaan masyarakat) dalam pembangunan kesehatan perlu dimaksimalkan

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan pencapaian kinerja yang telah diuraikan di atas, Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo pada tahun selanjutnya dalam upaya mendukung peningkatan kinerja merencanakan program/kegiatan, antara lain:

1. Optimalisasi pencapaian target
2. Meningkatkan jumlah dan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan serta penguatan kader terlatih
3. Pemenuhan sarana prasarana kesehatan untuk peningkatan kualitas pelayanan
4. Penguatan koordinasi dan berkolaborasi baik lintas program maupun lintas sektor
5. Peningkatan peran serta /partisipasi masyarakat dan swasta dalam bidang Kesehatan melalui advokasi, edukasi dan promosi kesehatan



Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Purworejo,

dr. Sudarmi, M.M

Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 19690220 200212 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

DINAS KESEHATAN

Jalan Mayjend. Sutoyo Nomor 17, Purworejo 54114, Telepon (0275) - 321034,
Laman dinkes.purworejokab.go.id, Pos-el dinkes@purworejokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR : 000.7.5 / 102 / 2024

TENTANG

TIM PENYUSUN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024 DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWOREJO

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo Tahun 2024 dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 11 Seri A Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo adalah :

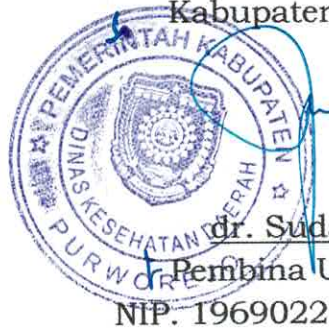
1. Mengumpulkan dan mengolah bahan materi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo;
2. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo;
3. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Purworejo
Pada tanggal : 31 Desember 2024

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Purworejo,



dr. Sudarmi, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690220 200212 2 004

Lampiran
Keputusan Kepala Dinas
Keseshatan Kabupaten
Purworejo
Nomor :
Tanggal : 02 Desember 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWOREJO

No.	Nama/NIP	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	dr. Sudarmi, M.M NIP.196902202002122004	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo	Penanggung jawab
2.	Ekaningtyas D, S.Kep, Ns, M.M NIP.19670110190032005	Sekretaris	Ketua
3.	Dwi Hastuti, S.K.M NIP.197204061992032007	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Surono Heru W, A.Md.Kep, S.KM, M.H NIP.198111062009011001	Administrator Kesehatan Ahli Muda	Anggota
5.	Anung Wibawati, S.K.M NIP.197708202000032002	Epidemiologi Kesehatan Ahli Muda	Anggota
6.	Nines Dwi Rahmani, S.Kep NIP.197905232006042020	Pengelola Pelayanan Kesehatan	Anggota
7.	Sulikhah, A.Md.Keb, S.K.M NIP.198612302009022006	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	Anggota
8.	Sri Mulyanti NIP.198101122014062001	Pengadministrasi Bahan Perencanaan dan Program	Anggota

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Purworejo,



dr. Sudarmi, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690220 200212 2 004

**TAHAPAN PENYUSUN LKjIP
DINAS KESEHATAN PURWOREJO
TAHUN 2024**

No	Agenda	November	Januari						
		27-29	9	10-12	15-19	22	23	24	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persiapan dan Penunjukan Tim								
2.	Rapat Koordinasi Tim								
3.	Pengumpulan Materi LKjIP								
4.	Penyusunan LKjIP								
5.	Pembahasan LKjIP dengan Tim								
6.	Finalisasi LKjIP								
7.	Konsultasi Hhasil Akhir LKjIP								
8.	Pengumpulan LKjIP								

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Purworejo,



dr. Sudarmi, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690220 200212 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO DINAS KESEHATAN DAERAH

Jalan Mayjend. Sutoyo Nomor 17, Purworejo 54114, Telepon (0275) - 321034,
Laman dinkes.purworejokab.go.id, Pos-el dinkes@purworejokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR : 000.75/ 29 / 2025

TENTANG

PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan Laporan Kinerja Tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Tim Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara, Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 11 Seri A Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 28 Seri E Nomor 18);
16. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo Tahun 2024.

KESATU : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Perencanaan Kinerja

BAB III : Akuntabilitas Kinerja

BAB IV : Penutup.

KEDUA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo Tahun 2024 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Purworejo
Pada tanggal : 20 Februari 2025

Kepala Dinas Kesehatan Daerah
Kabupaten Purworejo,



dr. Sudarmi, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690220 200212 2 004